KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Berevolusi Jadi Predator Politik
**Tanggal** : Jumat, 22 Maret 2019
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka
**Halaman** : 3

# Berevolusi Jadi Predator Politik

## Lembaga Survei Diusulkan Diatur dalam UU

**JAKARTA**–Keberadaan lembaga survei di tanah air di Indonesia kembali disorot. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan, lembaga-lembaga survei politik di Indonesia sebagai predator demokrasi. Sebab, banyak lembaga survei yang juga merangkap sebagai konsultan politik.

Hal tersebut disayangkan, kata politikus Partai Gerindra itu, karena lembaga-lembaga survei menjadi tidak independen dan justru membawa misi kepentingan politik tertentu.

"Inilah yang membuat lembaga survei itu sebetulnya merupakan (titik-titik, Red), memang tidak semuanya ya, tapi bisa jadi predator demokrasi, predator politik karena mereka ini jadi mafia," tudingnya dalam diskusi bertajuk 'Lembaga Survei, Realita atau Rekayasa?' di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/3).

Dia menyatakan, lembaga-lembaga survei menjadi mafia atau predator demokrasi karena mempublikasikan hasil survei yang bukan berdasar pada fakta sebenarnya. "Melainkan memberikan hasil survei seusia yang diminta oleh si pemesan. Mereka bekerja hanya sesuai kontrak politik yang sudah disepakati," tukasnya.

Selain itu, Fadli juga menyoroti soal tertutupnya lembaga survei mengenai sosok si pemesan. Padahal, tak masalah kalau ada survei pesanan kalau sosok itu turut diakui dan dipublikasikan oleh lembaganya. Cara seperti itu biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga survei di luar negeri, sehingga masyarakat bisa memahami maksud hasil survei tersebut.

"Jadi saya mengatakan bahwa ini adalah predator demokrasi, teroris dalam demokrasi," tegasnya.

Menurut Fadli, Indonesia membutuhkan undang-undang (UU) untuk mengatur keberadaan lembaga survei akibat lembaga tersebut telah menjadi industri berorientasi keuntungan dengan bekerja sebagai konsultan politik. Berubahnya lembaga survei menjadi industri yang beorientasi keuntungan menjadi hal yang tidak mengherankan, karena dalam setiap melakukan survei diperlukan biaya yang tidak sedikit.

> Jadi saya mengatakan bahwa ini adalah predator demokrasi, teroris dalam demokrasi. Harus ada aturan berupa Undang-undang untuk mengatur lembaga survei.
>
> *Fadli Zon*
> *Wakil Ketua DPR RI*

"Jadi harus ada aturan berupa Undang-undang untuk mengatur lembaga survei," tandasnya.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI Maruarar Sirait menilai, semua hasil survei akan tergantung pada rekam jejak lembaga survei itu sendiri. Sehingga rekam jejak lembaga survei itu yang dipertaruhkan kepada masyarakat.

"Selain itu akan ditentukan oleh kompetensi dan profesionalisme lembaga survei itu sendiri. Sama halnya dengan dokter, kalau orang itu sakit, ya tak bisa dibilang sehat," kata anggota Komisi XI DPR itu.

Yang jelas, kata Ara, kalau Jokowi menang lagi, Pak Fadli Zon dan Fahri Hamzah bisa menjadi menterinya Jokowi–Ma'ruf Amin. "Jadi, masing-masing mempunyai strategi untuk menang. Kita tetap bersatu, bersaudara dan pemilu ini damai," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Program Lembaga Survei SMRC Sirajuddin Abbas mengatakan, karena alasan menjadi industri itulah lembaga survei juga menjadi konsultan politik untuk kepentingan pemilihan kepala daerah maupun Pemilu legislatif dan pemilihan presiden sebagaimana yang dilakukan SMRC.

Dia setuju diperlukannya semacam sertifikasi selain dimungkinkannya UU yang mengatur keberadaan sebuah lembaga survei. "Lembaga survei sudah jadi industri. Ada manfaat untuk politik, tapi ada yang mengambil kesempatan untuk membangun industrinya dan tidak semua orang memiliki kualifikasi yang baik untuk membangun industri survei," ujarnya.

Sedangkan sosiolog yang juga Rektor Universitas Ibu Caldun Musni Umar mengaku, hasil penelitian yang diakukannya terhadap masyarakat jauh berbeda dari hasil survei yang diumumkan sejumlah lembaga.

Bahkan, lanjutnya, ada di satu daerah yang hasil surveinya memiliki elektabilitas sangat tinggi. Padahal, dalam kenyataannya ketika dia melakuan wawancara dan pengumpulan data, sangat tidak berkorelasi dengan tingkat elektabilitas tersebut. "Saya termasuk orang yang tidak percaya pada lembaga survei," tukasnya. (aen)